

Jumat, 11 Februari 2011

■ Mantan Wakil Bendahara KONI

Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Bansos

Pontianak, BERKAT.

Polda Kalbar tetapkan mantan Wakil Bendaharawan KONI Kalbar, Iswanto

” Hari ini (kemarin, red) Iswanto kita tetapkan sebagai tersangka ”



SUHADI SW

Kabid Humas Polda Kalbar

sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial Provinsi. Kamis (10/2) Meski terkesan lamban, namun pengu

LANJUTAN BACA HAL 11

✓ Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsidari Hal 1

sutan kasus tersebut mulai menunjukan kemajuan. Kini kasusnya terus dikembangkan dengan membidik tersangka lain.

”Hari ini (kemarin, red) Iswanto kita tetapkan sebagai tersangka. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Karena masih banyak lagi saksi yang akan dimintai keterangan,” ujar Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Suhadi SW, Kamis (10/2) siang.

Ketika ditetapkan sebagai tersangka, Iswanto sedang menjalani pemeriksaan lanjutan atas kasus dugaan korupsi Bansos Provinsi. Hingga akhirnya polisi memiliki cukup bukti untuk menetapkan Iswanto sebagai tersangka. Berdasarkan atas keterangan tersangka dan sejumlah saksi yang telah memberikan keterangan.

Selama pengusutan kasus dugaan korupsi Bansos Provinsi polisi telah memeriksa sebanyak 19 saksi. Saksi terdiri atas berbagai unsur. Antara lain delapan saksi PNS dari lingkungan pemprov Kalbar, delapan pengurus KONI Kalbar serta tiga pengurus cabang olahraga, termasuk tersangka.

Dalam mengusut aliran dana Bansos KONI, penyidik kepolisian masih banyak membutuhkan keterangan saksi. Terutama pengurus cabang olahraga. Semua pengurus bakal dipanggil untuk dimintai keterangan. ”Dalam waktu dekat ada

sekitar 30 pengurus cabang olahraga akan kita mintai kesaksiannya,” ungkap Suhadi.

Menurutnya, dalam penangananan Bansos pihaknya berupaya mengungkap keterlibatan semua pihak. Mempertanggungjawabkan perbuatan atas kasus dugaan penyalahgunaan dana Bansos. Karena itu, lanjut dia, banyak diperlukan keterangan saksi dalam mengungkap kasus tersebut.

Indikasi korupsi penggunaan Bansos Provinsi mulai muncul atas dasar hasil temuan audit BPK. Dimana penggunaannya terindikasi merugikan Negara senilai Rp 22,14 miliar. Total dari APBD Provinsi tahun 2006 hingga 2008. Hasil telaah itu mencakup penggunaan keuangan daerah oleh DPRD Kalimantan Barat periode 2004-2009 terindikasi kerugian daerah Rp10,07 miliar.

Pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara Koni kepada satgas prapon sebesar Rp1,368 miliar. Pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada satgas pelatda PON XVII sebesar Rp8,59 miliar.

Serta terakhir, ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp2,114 miliar. Khusus kasus pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada satgas prapon sebesar Rp1,368 miliar. (del)